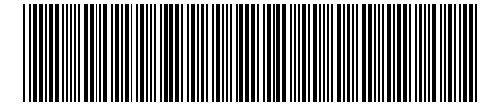




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : SP DIPA- 013.10.2.408899/2019**



DS:3098-7887-8354-0482

Revisi ke 03

Tanggal : 08 November 2019

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013) | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI |
| 2. Unit Organisasi | : (10) | BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL |
| 3. Provinsi | : (21) | MALUKU |
| 4. Kode>Nama Satker | : (408899) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON |
| Sebesar | : Rp. | 885.126.000 (DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH LIMA JUTA SERATUS DUA PULUH ENAM RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.10.12 Program Pembinaan Hukum Nasional
013.10.12.5256 Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah

Jumlah Uang

Rp.	885.126.000
Rp.	885.126.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 885.126.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|-------------------|-----------|-------------|
| 1. KPPN A M B O N | (061) Rp. | 885.126.000 |
|-------------------|-----------|-------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Jakarta, 05 Desember 2018
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408899/2019
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:3098-7887-8354-0482

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (21) MALUKU
Kode>Nama Satker : (408899) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON

Kuasa Pengguna Anggaran : THOLIB
Bendahara Pengeluaran : MAICHEL W. HUWAE
Pejabat Penanda Tangan SPM : BURHAZIR ZAMDA R.

Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN			885.126.000
Sub Fungsi	03.03	PEMBINAAN HUKUM			885.126.000
2 Program	013.10.12	Program Pembinaan Hukum Nasional			885.126.000
Sasaran Program	01	Terwujudnya Pembinaan Hukum			
Indikator Kinerja Program	01	Jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional	12	Rekomendasi	
	02	Jumlah RUU dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres yang sesuai dengan arah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional	20	RUU	
	03	Jumlah anggota JDIH yang memberikan layanan informasi hukum yang terintegrasi	25	JDIH	
	04	Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk di seluruh wilayah	175 Sadar Hu	Desa/Kelompok/Sekolah	
	05	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum	6500	Orang	
Output Program	01	Pembinaan Hukum Nasional			
Indikator Output Program	01	Jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional	12	Rekomendasi	
	02	Jumlah RUU dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres yang sesuai dengan arah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional	20	RUU	
	03	Jumlah anggota JDIH yang memberikan layanan informasi hukum yang terintegrasi	25	JDIH	
	04	Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk di seluruh wilayah	175 Sadar Hu	Desa/Kelompok/Sekolah	
	05	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum	6500	Orang	
	06	Layanan Internal Eselon I	1	Layanan	
Kegiatan	5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah			885.126.000
Sasaran Kegiatan	01	Terselenggaranya pembinaan hukum di seluruh wilayah			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi			
	02	Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang atau Kelompok masyarakat miskin			
	03	Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah			
	04	Jumlah penyuluhan hukum di daerah			
	05	Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah			
	06	Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN			
	07	Terselenggaranya pelatihan/peningkatan kapasitas bagi OBH dan Paralegal (Tematik)			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408899/2019
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:3098-7887-8354-0482

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (21) MALUKU
Kode>Nama Satker : (408899) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON

Kuasa Pengguna Anggaran : THOLIB
Bendahara Pengeluaran : MAICHEL W. HUWAE
Pejabat Penanda Tangan SPM : BURHAZIR ZAMDA R.

Halaman : IA.2

Output Kegiatan	5256.001	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi [PN]	96 Orang		448.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum Litigasi	5425	Orang/Kasus	
Output Kegiatan	5256.002	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi [PN]	11 Kegiatan		53.560.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Kegiatan Bantuan Non Litigasi kepada orang atau Kelompok Masyarakat Miskin	722	Kegiatan	
Output Kegiatan	5256.003	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	1 Kantor Wilayah		52.966.000
Indikator Output Kegiatan	01	Terselenggaranya Kegiatan Pelaksanaan Bantuan Hukum	33	Kantor Wilayah	
Output Kegiatan	5256.004	Penyuluhan Hukum dan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Daerah	1 Kantor Wilayah		165.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Penyuluhan Hukum di Daerah	33	Kantor Wilayah	
Output Kegiatan	5256.005	Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum di Daerah	1 Kantor Wilayah		70.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	33	Kantor Wilayah	
Output Kegiatan	5256.006	Layanan Informasi Hukum melalui sistem JDIHN	1 Kantor Wilayah		70.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Terselenggaranya Layanan Informasi Hukum Melalui Sistem JDIHN	33	Kantor Wilayah	
Output Kegiatan	5256.007	Pelatihan/Peningkatan Kapasitas Bagi OBH dan Paralegal (Tematik) [PN]	50 Peserta Kegiatan		25.600.000
Indikator Output Kegiatan	01	Terselenggaranya kegiatan pelatihan/peningkatan kapasitas bagi OBH dan Paralegal (Tematik)	1650	Peserta	

Jakarta, 05 Desember 2018
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

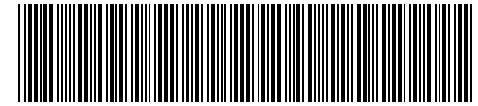
ttd.
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR : DIPA- 013.10.2.408899/2019

I B. SUMBER DANA



DS:3098-7887-8354-0482

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 Provinsi : (21) MALUKU
 Kode>Nama Satker : (408899) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON

		Pagu	Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2019	Rp.	885.126.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	885.126.000		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408899/2019
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:3098-7887-8354-0482

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (21) MALUKU
Kode>Nama Satker : (408899) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408899	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	-	885.126	-	-	-	885.126		
013.10.12	Program Pembinaan Hukum Nasional	-	885.126	-	-	-	885.126		
5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	-	885.126	-	-	-	885.126		
5256.001	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi [PN]	-	448.000	-	-	-	448.000	21 . 51	
01	RM	-	448.000	-	-	-	448.000	061	
5256.002	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi [PN]	-	53.560	-	-	-	53.560	21 . 51	
01	RM	-	53.560	-	-	-	53.560	061	
5256.003	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	-	52.966	-	-	-	52.966	21 . 51	
01	RM	-	52.966	-	-	-	52.966	061	
5256.004	Penyuluhan Hukum dan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Daerah	-	165.000	-	-	-	165.000	21 . 51	
01	RM	-	165.000	-	-	-	165.000	061	
5256.005	Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum di Daerah	-	70.000	-	-	-	70.000	21 . 51	
01	RM	-	70.000	-	-	-	70.000	061	
5256.006	Layanan Informasi Hukum melalui sistem JDIHN	-	70.000	-	-	-	70.000	21 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408899/2019
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:3098-7887-8354-0482

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (21) MALUKU
Kode>Nama Satker : (408899) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	70.000	-	-	-	70.000	061	
5256.007	Pelatihan/Peningkatan Kapasitas Bagi OBH dan Paralegal (Tematik) [PN]	-	25.600	-	-	-	25.600	21 . 51	
01 RM		-	25.600	-	-	-	25.600	061	
JUMLAH		-	885.126	-	-	-	885.126		

Jakarta, 05 Desember 2018
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408899/2019
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:3098-7887-8354-0482

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (21) MALUKU
Kode>Nama Satker : (408899) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON

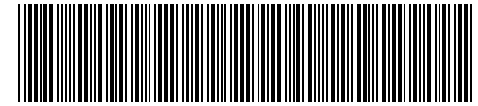
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408899	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON													
		RENCANA PENARIKAN DANA	10.234	17.998	39.700	48.348	50.818	56.464	98.019	95.372	103.400	105.518	142.134	117.121	885.126
		52 BELANJA BARANG	10.234	17.998	39.700	48.348	50.818	56.464	98.019	95.372	103.400	105.518	142.134	117.121	885.126
	013.10.12.5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	10.234	17.998	39.700	48.348	50.818	56.464	98.019	95.372	103.400	105.518	142.134	117.121	885.126
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	10.234	17.998	39.700	48.348	50.818	56.464	98.019	95.372	103.400	105.518	142.134	117.121	885.126

Jakarta, 05 Desember 2018
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408899/2019
IV A. B L O K I R**



DS:3098-7887-8354-0482

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [21] MALUKU
Kode dan Nama Satker : [408899] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2018
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttt.
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408899/2019
IV B. C A T A T A N**



DS:3098-7887-8354-0482

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [21] MALUKU
Kode dan Nama Satker : [408899] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2018
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttt.
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003